

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PNPM Mandiri

1. Pengertian PNPM Mandiri

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah:

- a) PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
- b) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai (pnpm-mandiri.org).

2. Tujuan PNPM Mandiri.

a. Tujuan umum adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

b. Tujuan Khusus.

- Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- Meningkatnya kapasitas kelembagaan yang mengakar, representatif dan akuntabel.
- Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*).
- Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
- Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan

komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat (Petunjuk Teknis PNPM Mandiri Perdesaan 2008:1-2).

3. Pendekatan dan Ruang Lingkup PNPM Mandiri

a). Pendekatan Program PNPM Mandiri

Pendekatan atau upaya-upaya nasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan:

1. Menggunakan kecamatan sebagai fokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan pelaksanaan dan pengendalian program.
2. Memposisikan masyarakat sebagai penentu atau pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.
3. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri dari atas pembelajaran, kemandirian dan keberlanjutan (pnpm-mandiri.org).

b). Ruang Lingkup PNPM Mandiri

Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi:

1. Penyediaan dan perbaikan prasarana atau sarana lingkungan pemukiman, sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya.
2. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian

yang lebih besar diberikan bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan dana bergulir ini.

3. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs.
4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik (pnpm-mandiri.org).

4. Komponen Program dalam PNPM Mandiri

Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut:

a). Pengembangan Masyarakat

Komponen Pengembangan Masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif dan pengorganisasian, pemanfaatan sumber daya, dan pemanfaatan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan, operasional pendampingan masyarakat dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi, dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

a) Bantuan Langsung Masyarakat

Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.

b) Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal

Komponen Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal adalah serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal atau kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini diantaranya seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya.

c) Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Komponen ini meliputi kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi dan pengembangan program (pnpm-mandiri.org)

B. Masyarakat Desa

1. Pengertian Masyarakat

Ada beberapa pengertian mengenai masyarakat :

a). Menurut Selo Sumardjan (1915-2003)

Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan (Soemardjan, dkk. 1994).

b). Menurut Karl Marx (dalam Lawang, 1986)

Masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau pengembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi.

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yaitu :

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Masyarakat Pedesaan

Dalam masyarakat yang modern, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan *rural community*, dan *urban community*. Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Penduduk masyarakat pedesaan pada umumnya hidup dari pertanian, walaupun terlihat

adanya tukang kayu, tukang genteng dan bata, pembuat gula bahkan tukang catut (ingat sistem “ijon”), akan tetapi inti pekerjaan penduduk adalah pertanian. Pekerjaan-pekerjaan di samping pertanian, hanya merupakan pekerjaan-pekerjaan sambilan saja, oleh karena bila tidak masa panen atau masa menanam padi, pekerjaan-pekerjaan sambilan tadi segera ditinggalkan.

C. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Mudrajad (2000:103) mendefinisikan kemiskinan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minima standar hidup tertentu.

Beberapa ahli lain mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan yang serba kekurangan dalam mendapatkan sumber pendapatan untuk hidup minimum dan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar (Tumanggor, Suparlan dalam Misbach, 2004:4).

Kemiskinan dapat dikatakan sebagai suatu hambatan dalam pembangunan, karena kemiskinan merupakan masalah keterbelakangan ekonomi suatu negara (M.L Jhingan, 1996:42). Kemiskinan dapat mengakibatkan masyarakat di suatu negara terutama di negara sedang berkembang tidak mempunyai akses yang cukup untuk memasuki sektor riil, baik sebagai pekerja maupun sebagai pelaku bisnis lainnya. Karena itu sangat diperlukan suatu upaya penanggulangan agar seluruh masyarakat dapat memasuki pasar kerja.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang telah mengakar dari tahun ke tahun di Indonesia. Kemiskinan menjadi suatu hal yang sangat menarik bagi kalangan

akademisi maupun praktisi. Ilmu kemiskinan dari hari kehari berkembang sesuai dengan perkembangan permasalahan yang terkait dengannya.

Kemiskinan pada dasarnya adalah suatu permasalahan yang kompleks dan tidak hanya berurusan dengan kepemilikan harta benda, kemiskinan bukan saja berurusan dengan ekonomi, tetapi bersifat multidimensional karena berurusan dengan persoalan-persoalan non ekonomi (sosial, budaya, dan politik).

Karena bersifat multidimensional tersebut maka kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan sosial. Menurut Suharto (2005), kemiskinan memiliki beberapa ciri, diantaranya:

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang dan papan).
- b. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan dan keluarga).
- c. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
- d. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal.
- e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam.
- f. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
- g. Ketiadaan akses terhadap lapangan pekerjaan dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
- h. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
- i. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

Soemardjan (1994), menyebutkan bahwa kemiskinan yang diakibatkan oleh struktur sosial yang ada, menjadikan masyarakat itu tidak dapat memperoleh pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Untuk mengatasi hal ini, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Secara lebih tegas Koentjaraningrat (1990), menekankan akan perlunya mentalitas pembangunan pada setiap diri manusia dan untuk menstimulir mentalitas tersebut dapat dicapai melalui pendidikan.

Secara umum ukuran kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua (Arsyad, 1992; 190-192), yaitu:

a. Kemiskinan absolut

Konsep kemiskinan pada dasarnya bisa diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Bila pendapatan tidak memenuhi kebutuhan minimum maka orang tersebut dapat dikatakan miskin.

Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin, atau yang sering disebut dengan garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut. Konsep ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian dan perumahan untuk kelangsungan hidup.

b. Kemiskinan relatif

Seseorang yang memiliki tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti tidak miskin. Ada ahli yang berpendapat bahwa meskipun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih ditentukan oleh keadaan sekitarnya.

Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah. Hal ini jelas merupakan pengembangan dari konsep kemiskinan absolut. Konsep kemiskinan relatif lebih bersifat dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada.

Menurut Soerjono Soekanto (2002:365). Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Menurut sifatnya kemiskinan dibagi menjadi dua, yaitu :

- a) Kemiskinan sementara, yaitu mereka yang menjadi miskin karena gejolak perekonomian atau bencana. Bila kondisi perekonomian membaik mereka dapat segera keluar dari kemiskinan.
- b). Kemiskinan kronis, yaitu disebabkan karena keterisolasian dan keterbatasan sumber daya dan juga disebabkan oleh kondisi sosial budaya, juga faktor individual (www.Pse.litbang.deptan.go.id).

2. Swadaya Masyarakat

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin adalah “dengan mengembangkan potensi swadaya dan keswadayaan yang ada melalui kelompok – kelompok yang sudah terbentuk dalam masyarakat yang bersangkutan” Rahardjo (dalam Nur Basarini, 2003:21). Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk adalah “melalui pengembangan masyarakat yang mendasar diri pada keswadayaan masyarakat “Ismawan (dalam Nur Basarini, 2003 : 21).

Rahadjo (dalam Nur Basarini, 2003 : 21) menyatakan bahwa swadaya, adalah upaya yang didasarkan pada kepercayaan kemampuan diri dan berdasar pada sumber daya yang dimiliki. Sedangkan keswadayaan masyarakat dipahami sebagai semangat untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada pihak luar atau kekuatan dengan memanfaatkan daya yang mereka miliki. Selain itu, Swadaya masyarakat merupakan suatu kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan fasilitas-fasilitas yang telah tersedia sebagai hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Kelompok keswadayaan masyarakat adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat guna mencapai kesejahteraan bersama. Dengan kata lain kelompok swadaya masyarakat merupakan suatu alat yang dapat menggerakkan sumber daya lokal guna mempertinggi kesejahteraan kelompok swadaya masyarakat bersama.

D. Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) sering dihubungkan dengan konsep kemandirian, keswadayaan (*self-reliance*), dan otonomi. Keswadayaan/kemandirian menurut Sastropetro (1988:84), Kemampuan dari

suatu masyarakat/kelompok dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengandalkan ikhtiar ke arah penentuan kebutuhan . Sementara itu, menurut Bambang Ismawan (dalam Hagul, 1986:18), kemandirian mengandung arti dengan *self managemen* dan *self organization*, kelompok/masyarakat mampu untuk merumuskan masalah yang dihadapi, merumuskan strategi dan memilih alternatif-alternatif yang diperlukan dalam mengatasi masalah tersebut. Berdasarkan dua definisi tersebut, dapat dicermati unsur utama yang terdapat dalam konsep keberdayaan, antara lain. Pertama, kuasa/wewenang untuk mengubah masa depan menjadi lebih baik terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan, dan kedua, suatu tindakan dari, oleh dan untuk mereka sendiri (mempunyai kemampuan untuk menolong dirinya sendiri).

Untuk mencapai kemandirian/keswadayaan perlu proses, yang sering dikenal sebagai proses pemberdayaan. Proses pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan dampak penguatan, sehingga tercipta kemandirian dan terdapat kemampuan untuk membebaskan diri dari ketergantungan ekonomi, emosi, dan fisik. Dengan demikian pemberdayaan bukan hanya sebagai konsep ekonomi, tetapi juga meliputi konsep politik. Pemberdayaan juga mencakup makna rekonstruksi sosial, yaitu proses yang ditunjukkan untuk/kepada perubahan sifat dan arah sistem sosial yang sebelumnya menempatkan kelompok-kelompok tertentu dalam posisi marginal. Dengan demikian, proses pemberdayaan sebagai rekonstruksi harus mampu mengembangkan suatu pemahaman baru tentang kekuasaan yang tak lagi menekan (dominasi) ataupun kompetisi, melainkan tertampilkannya dalam bentuk demokrasi, shering, maupun munculnya mekanisme-mekanisme baaru bagi suatu tanggung jawab. Disamping itu, proses

pemberdayaan harus menghasilkan berbagai alternatif pilihan yang lebih luas dan lebih bebas bagi siapa saja sehingga mendapatkan peluang yang sama untuk berperan dalam seluruh aspek kehidupan (Priyono,1996).

Dalam suatu proses pemberdayaan, terdapat tiga komponen yang saling berpengaruh, yakni : manusia, lingkungan dan sistem/struktur kelembagaan. Dan selama ini yang paling diintervensi adalah manusia, sementara lingkungan dan sistem/struktur kelembagaan masih berkuat pada nilai lama dan dikuasa sistem patriachat, misalnya : pola hubungan yang dikembangkan adalah patron-klien (ketergantungan) (Mubyarto,1997).

Untuk keberhasilan proses pemberdayaan diperlukan beberapa syarat, yaitu : syarat intern berupa manusia dan syarat ekstern meliputi lingkungan budaya dan sistem struktur. Syarat intern mengacu pada suatu kerangka proses individu, sehingga individu memiliki: *Pertama*, kemampuan untuk mengidentifikasi dan menyadari situasi sehingga mampu melihat alternatif-alternatif penyelesaian masalah. *Kedua*, memiliki kekuatan personal untuk mengatasi dan mengendalikan situasi tak langsung, dan selanjutnya kita langsung dan asertif, dan ketiga, mempunyai keberanian dan keterampilan untuk menghadapi situasi luar yang lebih menekan serta mengajukan alternatif yang lebih baik (Mubyarto,1994)

Kondisi kondisi di atas dapat dicapai melalui pemberdayaan yang meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahap penggalian dan penggugahan motivasi serta kesadaran kelompok
2. Tahap pembentukan organisasi dan pemahaman prinsip swadaya dan kerjasama

3. Tahap konsolidasi dan stabilitasi masyarakat (penerapan prinsip manajemen)
4. Tahapan pengembangan usaha produksi dan pemasaran—peningkatan keterampilan dan kewiraswastaan.
5. Tahapan lepas landas ditunjukkan dengan kemampuan menjaga kontinuitas hidupnya kelompok, kemampuan membiayai pelayanan masyarakat (hasil pendidikan kelompok, dan kemampuan berpartisipasi).

E. Manfaat PNPM Mandiri

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1994: 858). Kata manfaat diartikan sebagai “guna, faedah, laba, untung”. Dengan demikian, manfaat berdasarkan pengertian masing-masing adalah guna, faedah, laba, untung yang didapat dari perihal mempraktikkan atau hasil kerja menerapkannya. Dalam hal ini adalah guna atau keuntungan yaitu manfaat dari pelaksana PNPM Mandiri bagi masyarakat.

Program PNPM Mandiri sangat berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, sesuai dengan tujuan program tersebut, yaitu :

1. Membangun sarana prasarana pendukung bagi desa.
2. Meningkatkan kepedulian, perhatian/dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, meningkatkan kualitas kegiatan dengan penggunaan teknologi sederhana, meningkatkan ketrampilan masyarakat desa dalam perencanaan, pengendalian, monitoring dan pemeliharaan prasarana, dalam teknis pelaksanaan.
3. Dalam bidang pendidikan PNPM Mandiri pedesaan juga ikut memperbaiki, karena bidang pendidikan merupakan salah satu jenis kegiatan yang dapat dipilih masyarakat secara demokratis pada Musyawarah Desa dan Musyawarah

Antar Desa. Sejalan dengan prinsip Open Menu, semua jenis kegiatan formal maupun nonformal (termasuk pelatihan ketrampilan masyarakat). Hal itu bertujuan untuk mempercepat upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan menitikberatkan pada pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan kapasitas rumah tangga miskin pedesaan melalui pelatihan bagi pemuda putus sekolah, ibu-ibu rumah tangga untuk menciptakan daya saing dan lapangan pekerjaan.

4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
5. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.
6. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal.
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.
8. Pengembangan jaringan kemitraan dalam masyarakat.

Cukup banyak manfaat yang bisa didapatkan dari PNPM Mandiri dengan program pemberdayaan masyarakat yang memberikan manfaat dengan mengusahakan semua warganya bisa berpartisipasi langsung untuk membangun daerahnya, sehingga setiap warga bisa merasakan proses dalam pencapaian kesejahteraan yang direncanakan

F. Kerangka Pikir

Masyarakat yang mandiri tidak mungkin diwujudkan secara instan, melainkan melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Melalui kegiatan yang dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.

Berikut ini disajikan diagram alur kerangka pemikiran dalam penelitian ini:

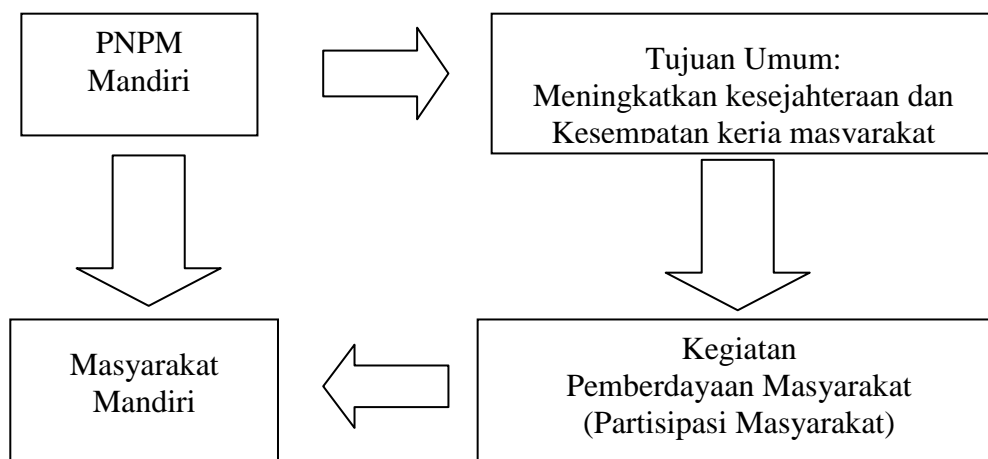


Diagram 1.1. Kerangka Pikir

Pemikiran tentang pemberdayaan masyarakat tidak akan terlepas dari pengertian pengembangan masyarakat dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat terkait dengan istilah keberdayaan masyarakat yaitu kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental serta terdidik dan kuat serta inovatif, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Sedangkan memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang kelak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Saat seluruh prinsip-prinsip tentang pelaksanaan PNPM Mandiri ini telah dilaksanakan dan diterapkan dengan baik maka apa yang diharapkan dari PNPM Mandiri ini haruslah dapat tercapai. Oleh karena itu penelitian ini akan menganalisis manfaat pelaksanaan program PNPM Mandiri bagi masyarakat di Kampung Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.